

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM SENGKETA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA HAK MENGHUNI ATAS RUMAH NEGARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599 K/TUN/2019)

Oleh :

LAILA AZIZAH

**Pembimbing 1 : Dr.Marzuki,SH.,M.Hum
Pembimbing 2 : Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.**

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar, dengan keyakinan betapa sangat dihargai dan bermanfaat tanah untuk kehidupan manusia.

Permasalahannya adalah pengaturan status kepemilikan atas rumah hunian negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, proses peralihan hak kepemilikan atas rumah hunian negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hakim atas sengketa surat keputusan gubernur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599 K/TUN/2019

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan status kepemilikan atas rumah hunian negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pejabat atau Pegawai Negeri yang memanfaatkan fasilitas Rumah Negara harus memperhatikan syarat-syarat penghunian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP, Proses peralihan hak kepemilikan atas rumah hunian negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Tanah negara yang dapat dimohon suatu hak atas tanah dapat berupa : Tanah negara yang masih kosong atau murni. Pertimbangan hakim atas sengketa surat keputusan gubernur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599 K/TUN/2019, alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Sengketa, Rumah Negara

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF DISPUTES ON GOVERNOR DECREES THAT RESULT IN THE LOSS OF THE RIGHT TO RESIDENT OF A STATE HOUSE (Case Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 599 K/TUN/2019)

By :

LAILA AZIZAH

Advisor 1 : Dr.Marzuki,SH.,M.Hum

Advisor 2 : Adil Akhyar, SH., L.L.M., Ph.D.

Land is a source of livelihood and livelihood for humans and society so that it becomes the most basic human need, with the belief that land is highly valued and beneficial for human life.

The problem is the regulation of the ownership status of state residential houses in accordance with laws and regulations, the process of transferring ownership rights to state residential houses in accordance with statutory regulations and the judge's consideration of the dispute over the governor's decree in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 599 K/ TUN/2019

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It is concluded that the regulation of the status of ownership of a state residential house in accordance with statutory regulations. Officials or civil servants who utilize the facilities of a state house must pay attention to the conditions for occupancy as stipulated in Article 8 PP, The process of transferring ownership rights to a state residential house in accordance with the regulations legislation, State land that can be applied for a land right can be in the form of: State land that is still vacant or pure. The judge's consideration of the dispute over the governor's decision letter in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 599 K/TUN/2019, the reasons for cassation are essentially regarding the evaluation of the results of evidence that are award-winning about a fact, *Judex Facti's* decision in this case is not contrary to law and/ or law, therefore the appeal must be rejected.

Keywords: Legal Analysis, Dispute, State House.